

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sejatinya telah memberikan peran penting dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia yang dimulai sejak era Orde Baru dan reformasi dengan berbagai dinamika politik yang telah dilalui. Indonesia pertama kali mengadakan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pemilihan umum diadakan sebagai momentum khusus yang ditunjukkan bagi partai politik untuk ikut berpartisipasi demi mendapatkan kekuasaan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Serangkaian Pemilu yang diadakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 merupakan Pemilu yang dilakukan pasca Orde Baru. Partisipasi partai politik pada Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai, Pemilu tahun 2004 di ikuti oleh 24 partai, Pemilu tahun 2009 di ikuti oleh 38 partai, Pemilu 2014 di ikuti oleh 12 partai dan Pemilu 2019 di ikuti oleh 14 partai.¹

Pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik yang ikut serta dalam Pemilu berjumlah 14 partai politik. Dari jumlah peserta partai politik tersebut di ikuti oleh 4 partai politik pendatang baru untuk Pemilu 2019, yaitu berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia

¹ Nasional Kompas, 2018, "Partai Politik Yang Bertarung Di Pemilu Dari Masa Ke Masa," <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-Pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>. Diakses 26 Mei 2021 pukul 21.12 WIB

(Perindo), dan Partai Berkarya.² Fenomena munculnya partai baru di Indonesia bukan menjadi hal baru lagi. Masuknya partai-partai baru ke pesta Pemilu menimbulkan persaingan ketat antara partai lama dan baru dalam memperebutkan hak pilih masyarakat.

Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok-kelompok orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat demi memperoleh kedudukan dan mendapatkan kekuasaan.³ Pada dasarnya partai politik ada sebagai perwujudan dari pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh Indonesia pada hakikatnya negara menjamin kebebasan warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Gagasan partisipasi masyarakat memiliki landasan ideologis, yaitu masyarakat berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Partisipasi politik mencakup partisipasi langsung atau tidak langsung individu dalam kegiatan pembuatan kebijakan publik. Kegiatan ini meliputi memberikan hak suara dalam pemilihan umum dan menjadi anggota politik suatu partai.

Indonesia yang menganut sistem multipartai, artinya sistem kepartaiannya tidak hanya satu yang dominan melainkan memiliki banyak partai. Untuk ikut serta dalam Pemilu di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa untuk dapat ikut serta dalam Pemilu, partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh tingkat

² Ridho Imawan Hanafi, "Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 197.

³Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977). Hal 160-161

provinsi, 75% di tingkat kabupaten/kota dan 50% di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

Partai politik seringkali mendapatkan kesulitan dalam memperoleh perizinan sebab syarat-syarat pendaftaran semakin diperketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Partai Bulan Bintang salah satu partai yang tidak ikut dalam Pemilu 2019 dikarenakan PBB tidak lolos dalam tahap uji verifikasi. KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebanyak 75% di tingkat kabupaten/kota disebabkan oleh enam anggotanya di Kabupaten Manokwari Selatan terlambat hadir saat verifikasi karena terkendala kondisi geografis.⁴ Dalam kasus ini KPU tidak mentolerir alasan yang diberikan PBB, walaupun telah dijelaskan bahwa adanya kesulitan dalam mengakses jalan menuju lokasi tersebut, sehingga konsekuensinya PBB gagal ikut dalam Pemilu 2019.

Pemerintahan sudah dapat dikatakan demokratis dengan kehadiran partai politik yang mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi partai yang dapat memaksimalkan fungsinya dengan baik, sebaliknya partai yang tidak dapat bertahan dalam tahapan tersebut akan berakhir dengan kemerosotan. Keikutsertaan partai-partai baru dalam Pemilu membuat ruang persaingan semakin sulit karena partai lama dan partai baru akan saling bersaing dalam memperebutkan suara dari masyarakat. Partai-partai baru dalam Pemilu akan berhadapan dengan partai-partai lama, dan partai-partai tersebut seringkali mampu

⁴Nasional Tempo, "Yusril Ihza: PBB Dari Dulu Selalu Dipersulit Untuk Ikut Pemilu," 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1061673/yusril-ihza-pbb-dari-dulu-selalu-dipersulit-untuk-ikut-pemilu> .Diakses 30 Mei 2021. Pukul 20.41 WIB

mempertahankan eksistensinya di Pemilu, yang terbukti dengan berhasilnya merebut kursi parlemen.

Huntington mengungkapkan, tumbuh kembang partai politik setidaknya telah mengalami empat tahapan penting, yakni faksionalisme, polarisasi, pemekaran, dan pelembagaan.⁵ Pelembagaan yang dimaksud yaitu proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang sistematis dan dapat mendukung pemerintahan yang demokratis. Terdapat dua ahli yang berbicara mengenai pelembagaan partai politik yaitu Vicky Randall dan Lars Svavand yang berusaha menjelaskan pelembagaan partai politik melalui dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Hasil dari persilangan antara kedua aspek tersebut memunculkan empat dimensi yaitu dimensi *systemness*, dimensi *decisional autonomy*, dimensi *value infusion* dan dimensi *reification*. Indikator-indikator inilah yang nantinya peneliti gunakan untuk melihat pelembagaan dari Partai Berkarya di Kota Padang.

Pelembagaan partai politik merupakan proses pematapan sikap dan perilaku partai politik. Secara umum, pelembagaan partai politik mengacu pada kedewasaan organisasi yang mencerminkan prinsip demokrasi secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, pelembagaan partai politik pada tahap ini sangat penting agar partai politik mampu bertahan dengan baik dari persaingan politik dimasa yang akan datang. Keberadaan partai politik yang sudah melembaga berada ditingkat yang lebih mumpuni tidak mudah untuk dicapai, hal ini yang kemudian menjadi tantangan setiap partai politik di Indonesia, terutama bagi

⁵ Huntington dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm. 65.

partai baru. Hal ini sejalan dengan anggapan dari masyarakat mengenai citra partai yang semakin hari kian menurun, partai politik dianggap kurang mampu menjalankan fungsinya, fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik saat ini lebih fokus pada penetapan strategi politik jangka pendek untuk memenangkan Pemilu, ketimbang fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan partai. Selain permasalahan tersebut, persoalan mengenai spekulasi tentang penyimpangan partai di masyarakat, terutama peran dalam memperjuangkan dan menghimpun aspirasi publik juga sering dipertanyakan. Maraknya partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kehadiran partai baru diharapkan mampu untuk mendulang kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai dengan memunculkan wajah kader-kader partai baru yang lebih berkualitas.

Pemilihan legislatif merupakan momentum khusus yang diadakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan masyarakat yaitu untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Pemilu legislatif diadakan dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Pada pemilihan anggota legislatif di Kota Padang tahun 2019 diikuti oleh calon legislatif yang berjumlah terdiri dari 470 calon legislatif laki-laki dan 246 calon legislatif perempuan.⁶ Secara umum, calon legislatif terpilih adalah orang yang disenangi oleh masyarakat, dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat setempat.

⁶ Padang.Go.Id, 2018, "KPU Padang Umumkan Daftar Calon Tetap 2019, Keterwakilan Perempuan 34 Persen," <https://info.padang.go.id/kpu-padang-umumkan-daftar-calon-tetap-2019-keterwakilan-perempuan-34-persen>. diakses 23 Februari 2021

Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya merupakan salah satu partai pendatang baru di arena Pemilu 2019. Partai Berkarya berdiri pada tanggal 15 Juli 2016 yang artinya Partai Berkarya baru pertama kali ikut dalam Pemilu di tahun 2019.⁷ Partai Berkarya memiliki visi dan misi yang menggambarkan tujuan dan cita-cita Partai Berkarya. Partai ini merupakan suatu partai yang terbentuk atas dasar adanya gagasan untuk memiliki kesadaran politik sendiri. Partai Berkarya sebagai partai yang masih baru memerlukan strategi dalam menyusun kekuatan politik. Hal ini sebagai upaya persaingan melawan partai yang sudah sejak lama terbentuk yang artinya partai tersebut sudah terorganisir dengan baik. Partai Berkarya memerlukan upaya untuk mencapai pelebagaan partai agar dapat berkembang dan mampu terorganisir baik itu ditingkat nasional maupun di daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu Nurlatipah Nasir “*Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai politik Dengan Konstituen*” penelitian ini membahas mengenai permasalahan hubungan masyarakat dan partai karena tingginya angka *electoral volatility*, hal ini disebabkan karena kurangnya kelembagaan partai politik terhadap masyarakat.⁸ Aprista Ristyawati juga membahas “Penguatan Partai politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelebagaan Demokrasi” penelitian ini memamparkan tiga permasalahan utama yang dialami oleh partai politik yaitu melemahnya ideologi dari partai, kualitas rekrutmen partai

⁷Suara.Com, 2016, “Partai Berkarya Sesuai Tanggal Lahir Tommy Soeharto, Muchdi Ikut,”<https://www.suara.com/news/2016/10/17/181138/partai-berkarya-sesuai-tanggal-lahir-tommy-soeharto-muchdi-ikut?page=all>. diakses 28 Agustus 2021

⁸ Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, *Jurnal Politik Profetik*, 4.1 (2016), 37–65.

yang kian menurun, dan krisis penggalangan dana / kegiatan penggalangan dana partai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pelembagaan partai politik.⁹

Penelitian lain juga membahas “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya Di Tingkat Lokal; Fenomena Politik Klan” oleh Muhammad Ridha T.R, penelitian ini membahas mengenai maraknya fenomena politik klan yang terjadi di Indonesia.¹⁰ Selanjutnya penelitian Oka Darmi Dwi Kaypama “Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014”¹¹ penelitian terdahulu ini melihat faktor dominasi Partai Golkar dari sudut pandang pelembagaan partai politik.

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu di atas, peneliti melihat adanya perbedaan dengan apa yang akan peneliti teliti sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih melihat kepada hubungan antara tingkat pelembagaan partai politik dengan *electoral volatility*, kemudian lemahnya partai politik dapat di atasi dengan penguatan pelembagaan partai politik, kedua penelitian ini hanya melihat pelembagaan partai politik secara umum, dan keterkaitan pelembagaan Partai Golkar disebabkan oleh politik klan yang dilihat dari segi internal Partai Golkar saja.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih kepada mempertanyakan apakah perolehan kursi yang diperoleh Partai Berkarya di

⁹ Aprista Ristyawati, Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi, Jurnal *Administrative Law and Governance* 2.4 (2019), 710–120 .

¹⁰ Muhammad Ridha, ‘Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan’, *CosmoGov*, 2.1 (2017), 160.

¹¹ Okadarmi Dwi Kaypama, 2019. Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014, Skripsi. Universitas Andalas, 2019.

pengaruhi oleh faktor pelebagaan partai tersebut yang sudah berjalan dengan baik atau tidak. Terlihat dari temuan awal peneliti bahwa Partai Berkarya sudah melembaga dari dimensi reifikasi atau citra partai dan dari segi struktural. Asumsi peneliti yaitu Partai Berkarya mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang karena sudah terlembaga dengan baik. Penelitian ini semakin menarik diteliti karena perolehan kursi Partai Berkarya dalam Pemilihan Legislatif 2019 dilihat dari segi pelebagaan partai bukan dilihat dari marketing atau strategi partai politik yang sering dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berangkat dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelebagaan yang dimiliki oleh partai baru yaitu Partai Berkarya.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan umum presiden sekaligus pemilihan legislatif yang diselenggarakan serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan momentum baru dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Kota Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat ikut melangsungkan Pemilu dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mengatakan partisipasi masyarakat Pemilu 2019 di Kota Padang semakin meningkat pada tahun ini persentase pemilihannya sebesar 79,60% yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 63,7%.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan 14 partai yang ikut dalam Pemilu 2019, diantara partai tersebut terdapat 4 partai baru yang ikut bersaing dengan partai lama, diantara partai baru tersebut yaitu Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia. Popularitas empat partai tersebut berkembang dengan pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini

tidak terlepas dari kekuatan pendirinya yang berasal dari berbagai bidang, di antaranya dibidang pengusaha, jurnalis, dan aktivis. Partai baru ini memiliki ide dan strategi tersendiri untuk menarik simpati publik dan mendapatkan suara di Pemilu 2019.¹²

Pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2019, terdapat 45 bakal calon legislatif periode 2019-2024 yang diikuti oleh 14 partai politik yaitu PDIP, Partai Berkarya, PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, PKS, Partai Golkar, PKB, Partai Hanura, PSI, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Berikut adalah perolehan kursi partai politik dari yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu legislatif tahun 2019.

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Legislatif Kota Padang Tahun 2019

No	Partai politik	Jumlah perolehan kursi 2019
1	PKB	-
2	Gerindra	11
3	PDI-P	3
4	Golkar	3
5	Nasdem	1
6	Berkarya	2
7	PKS	9
8	PPP	3
9	PAN	7
10	Hanura	-
11	Demokrat	6
12	Garuda	-
13	Perindo	-
14	PSI	-
	Total	45

Sumber: Data Sekunder KPU Kota Padang

¹²Tempo.co. 2018. "Empat Partai Baru di Pemilu 2019 dan Kekuatan Pendirinya." <https://6/nasional.tempo.co/read/1062006/empat-partai-baru-di-Pemilu-2019-dan-kekuatan-pendirinya/full&view=ok> diakses 24 Februari 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Partai Gerindra keluar sebagai partai yang memperoleh jumlah kursi terbanyak yaitu 11 kursi, disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 9 kursi, PAN sebanyak 7 kursi, Partai Demokrat sebanyak 6 kursi, PDI-P 3 kursi, Partai Golkar 3 kursi, PPP 3 kursi. Peneliti berasumsi bahwa perolehan suara karena masyarakat sudah mengenal partai-partai tersebut karena pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya partai tersebut sudah mengikuti Pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Partai Berkarya sebagai partai baru yang berdiri tahun 2016 dan baru pertama kali ikut dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 mampu mendapatkan 2 kursi di DPRD Kota Padang.

Tabel 1.2 Perolehan Suara Partai politik pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019

No	Partai politik	Perolehan Suara
1	PAN	60.119
2	PKS	77.637
3	Gerindra	96.748
4	Golkar	23.742
5	Demokrat	45.474
6	PPP	22.679
7	PDIP	22.550
8	Berkarya	17.708
9	Nasdem	17.535
	Total	384.188

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas jumlah suara yang berhasil dikumpulkan oleh partai Berkarya dalam pemilihan legislatif Kota Padang tahun 2019 sebanyak 17.708 suara dari total 384.188 suara. Untuk Kota Padang Partai Berkarya memperoleh suara pada dapil dua yaitu di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan

Pauh sebanyak 4.250 suara dan dapil empat di Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan sebanyak 4.824 suara. Keberhasilan Partai Berkarya untuk masuk ke dalam DPRD Kota Padang merupakan pencapaian yang baik mengingat bahwa Partai Berkarya masih berumur dua tahun semenjak didirikan dan sebagai partai baru yang pertama kali ikut serta dalam pemilihan legislatif di tahun 2019. Dibandingkan dengan empat partai baru seperti PSI, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Garuda hanya Partai Berkarya yang dapat lolos mendapatkan dua kursi DPRD Kota Padang.

Tabel 1.3 Kursi Partai Berkarya Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Seluruh Kab/Kota Sumatera Barat



No	Kab/kota	Jumlah kursi 2019
1	Kab Pesisir Selatan	1
2	Kab. Solok	-
3	Kab. Sijunjung	-
4	Kab. Tanah Datar	-
5	Kab. Padang Pariaman	-
6	Kab Agam	1
7	Kab. Pasaman	-
8	Kab. 50 Kota	-
9	Kab. Kep.Mentawai	-
10	Kab. Dhamasraya	2
11	Kab. Solok Selatan	1
12	Kab. Pasaman Barat	-
13	Kota Padang	2
14	Kota Solok	-
15	Kota Sawahlunto	-
16	Kota Padang Panjang	-
17	Kota Bukittinggi	-
18	Kota Payakumbuh	-
19	Kota Pariaman	-
	Total	7

Sumber : data sekunder diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perolehan kursi Partai Berkarya di DPRD Sumatera Barat sebanyak 7 kursi. Perolehan kursi yang didapatkan oleh Partai Berkarya merupakan capaian yang baik mengingat partai ini merupakan partai yang masih baru. Peneliti berasumsi bahwa perolehan kursi Partai Berkarya dalam mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang karena pelembagaan Partai Berkarya. Asumsi ini didasarkan pada fakta-fakta yang peneliti temukan terkait dengan pelembagaan Partai Berkarya. Berdasarkan teori pelembagaan menurut Randall dan Svasand terdapat empat indikator bahwa suatu partai tersebut sudah dikatakan melembaga atau tidak, indikator tersebut yaitu dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi otonomi, dimensi reifikasi. Salah satu indikatornya yaitu dimensi reifikasi merupakan dimensi yang berkaitan dengan bagaimana suatu partai politik mampu memberikan citra yang positif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Asumsi peneliti diperkuat dengan wawancara dari salah seorang anggota DPRD Kota Padang yang berasal dari Partai Berkarya, beliau mengatakan :

“Partai Berkarya gencar melakukan sosialisasi ditengah dimasyarakat, misalnya dengan melakukan kegiatan gotong royong di beberapa masjid di Kota Padang bapak hadir di sana, kemudian bapak pasang atribut seperti bendera dan baju bersama masyarakat, kemudian ada even-even tertentu yang dilakukan Partai Berkarya salah satunya saat ulang tahun Partai Berkarya itu dirayakan bersama-sama anak panti asuhan.”¹³

Melalui wawancara peneliti dengan informan membuktikan bahwa Partai Berkarya berusaha membangun citra yang positif ditengah masyarakat Kota Padang melalui kegiatan yang berbasis sosial. Partai Berkarya berusaha mendapatkan perhatian massa dengan berusaha hadir ditengah-tengah masyarakat.

¹³ Hasil wawancara singkat dengan bapak Helmi Moesim anggota DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya pada tanggal 13 maret 2021 pukul 22.16 WIB

Keikutsertaan Partai Berkarya ditengah masyarakat ini berkaitan dengan figur aktor yang akan mengikuti pemilihan sebagai anggota DPRD, figur bukan hanya tentang popularitas calon anggota tersebut melainkan figur terbentuk dari perilaku sosial, pendidikan, dan bisa juga dinilai dari kepribadian dari sosok tokoh tersebut. Karena sosok figur politik sebagai aspek penting terhadap penerimaan masyarakat dalam menentukan preferensi pilihannya. Pengamat politik Andri Rusta mengatakan bahwa peluang untuk partai baru dalam mengikuti Pemilu di Kota Padang, Andri mengambil contoh Partai Berkarya yang di nilai memiliki peluang mendapatkan kursi karena memiliki sejumlah calon legislatif yang cukup kuat, seperti pada Dapil IV dimana terdapat salah satu calon legislatif yang berpeluang meraih suara signifikan.¹⁴ Pernyataan tersebut yang menjadi penguat asumsi peneliti bahwa Partai Berkarya sudah mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas. Sejalan dengan konsep dari Randall dan Svasand yang mengatakan bahwa partai sudah dapat dikatakan melembaga dari dimensi kesisteman dimana proses pelaksanaan dalam partai berkaitan dengan proses kaderisasi dan manajemen sumber daya yang sudah baik.

Namun dalam penelitian inilah nantinya akan menjawab apakah perolehan kursi Partai Berkarya diperoleh karena sosok figur yang dominan atau karena pelembagaan partai politik yang sudah dimiliki oleh Partai Berkarya itu sendiri. Kemudian dari segi struktural, Partai Berkarya merupakan partai politik dengan struktur yang lengkap, terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain itu Partai

¹⁴Harian Haluan, 2019, "Peluang Parpol Di Sumbar, Menanti Tuah Calon legislatif-Calon legislatif Kuat," <https://www.harianhaluan.com/politik/pr-10209607/peluang-parpol-di-sumbar-menanti-tuah-calon-legislatifcalon-legislatif-kuat?page=2>. diakses 15 September 2021

Berkarya juga memiliki sayap partai yang disebut dengan Benteng Berkarya yang tujuannya untuk terjun langsung membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada. Peneliti nantinya akan membuktikan penelitian ini dengan menggunakan perspektif teori pelebagaan Randall dan Svasand. Melebaga di sini artinya Partai Berkarya sudah melalui proses pematapan dalam partai politik baik itu dalam membentuk sikap atau perilaku untuk menghasilkan partai perwakilan yang dapat menjalankan fungsinya.

Pelebagaan partai politik juga terkait dengan bagaimana partai politik meningkatkan kemampuannya untuk tetap eksis serta menjalankan fungsinya secara internal. Arah pelebagaan merupakan membentuk partai politik dengan kapasitas pelebagaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya serta bersaing dengan partai lain. Asumsi penelitian yang peneliti bangun disini adalah bahwa perolehan kursi Partai Berkarya pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang disebabkan karena tingkat pelebagaan yang dimiliki Partai Berkarya Kota Padang tersebut. Asumsi yang peneliti bangun ini didasarkan atas fakta-fakta yang peneliti temukan seperti yang telah peneliti paparkan di atas. Itulah yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai data awal dalam melihat lebih jauh pelebagaan yang dimiliki Partai Berkarya Kota Padang. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran serta menjaga pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelebagaan Partai Berkarya sehingga Partai Berkarya dapat meraih kursi di DPRD kota Padang pada Pemilu legislatif 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelebagaan Partai Berkarya sebagai partai baru yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara akademis, dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan pelebagaan partai politik, serta nantinya dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya guna menambah wawasan dalam bidang ilmu politik serta pembelajaran untuk penelitian mahasiswa lainnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada partai politik untuk lebih dapat memahami dan menjalankan pelebagaan partai politik baik itu secara stuktural maupun kultural. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik agar dapat membenahi kondisi dari internal maupun eksternal partai demi mewujudkan partai politik yang terlembaga dengan baik.

